

Penguasaan Konsep & Penalaran Kasus **Pancasila**

Panduan komprehensif memahami sejarah, kedudukan, analisis antarsila, hingga strategi penyelesaian soal penalaran TKA.



3 Tingkat Kemampuan Penilaian TKA–SMA



1. Konseptual

Penguasaan definisi, sejarah perumusan, serta kedudukan dan fungsi utama Pancasila.



2. Penerapan

Implementasi nilai sila dalam kehidupan sekolah, masyarakat, dan tantangan global.



3. Penalaran Kasus

Evaluasi konflik sosial, isu HAM, dan solusi adil berbasis keutuhan antarsila.

3 Tonggak Utama Perumusan Pancasila (1945)

1

1 Juni 1945 — Pidato Soekarno (BPUPK)

Pengenalan awal istilah & usulan dasar negara: Kebangsaan, Internasionalisme, Demokrasi, Kesejahteraan, Ketuhanan.

2

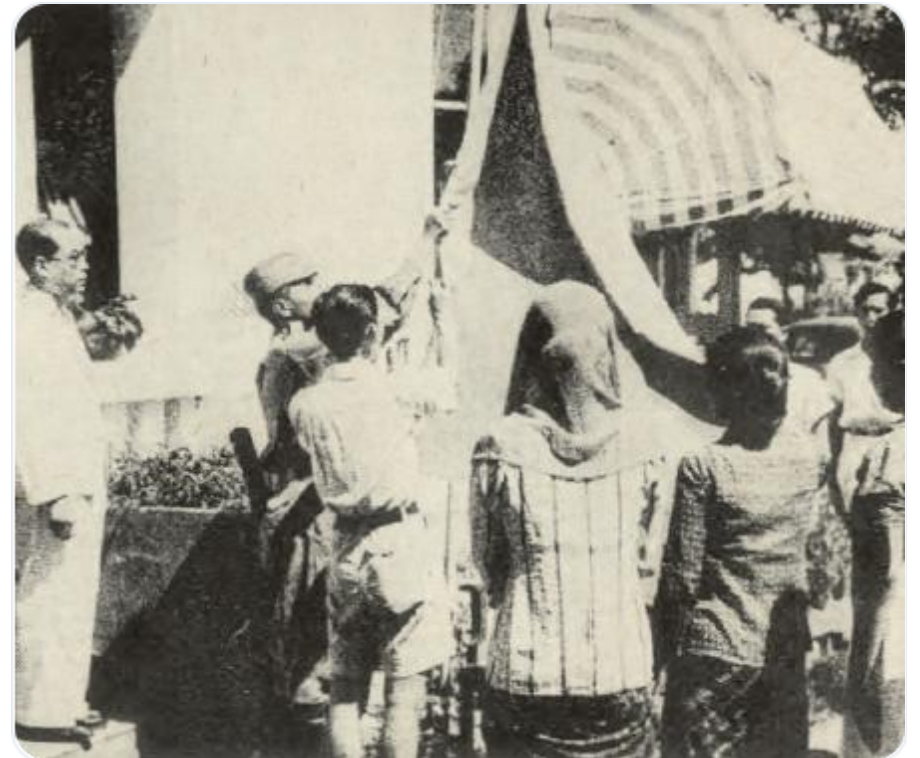
22 Juni 1945 — Piagam Jakarta

Hasil kompromi Panitia Sembilan menyusun pilar kebangsaan dan rancangan Pembukaan UUD.

3

18 Agustus 1945 — Pengesahan PPKI

Rumusan final Pancasila disahkan secara resmi dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.



4 Kedudukan & Peran Utama Pancasila

PENYELENGGARAAN NEGARA

Dasar Negara

Landasan hukum tertinggi, pembentukan undang-undang, dan tata kelola kebijakan pemerintah.

ARAH & CITA-CITA

Ideologi Negara

Pedoman nilai terbuka dalam menghadapi dinamika zaman dan tujuan bersama bangsa.

PEDOMAN PERILAKU

Pandangan Hidup

Petunjuk norma etika harian dalam keluarga, sekolah, dan interaksi bermasyarakat.

JATI DIRI BANGSA

Identitas Nasional

Karakter unik Indonesia yang menyatukan keberagaman suku, budaya, dan agama.

Penerapan vs Pelanggaran: Sila 1, 2, dan 3

Sila 1: Ketuhanan

CONTOH PENERAPAN

Saling menghormati kebebasan ibadah antarumat beragama.

KONTRA-CONTOH (PELANGGARAN)

Intoleransi dan pemaksaan keyakinan agama kepada orang lain.

Sila 2: Kemanusiaan

CONTOH PENERAPAN

Menjunjung tinggi harkat kemanusiaan dan empati sosial.

KONTRA-CONTOH (PELANGGARAN)

Perundungan (bullying), diskriminasi RAS, dan kekerasan.

Sila 3: Persatuan

CONTOH PENERAPAN

Mengutamakan kepentingan bersama di atas golongan.

KONTRA-CONTOH (PELANGGARAN)

Etnosentrisme sempit, sukuisme, dan penyebaran hoaks pemecah belah.

Analisis Esensi Sila 4 dan Sila 5

Sila 4: Musyawarah & Demokrasi

Fokus Utama: Musyawarah mufakat, kedaulatan rakyat, dan kebebasan berpendapat.

Prinsip TKA: Tidak memaksakan kehendak serta menghormati keputusan bersama.

Bentuk pelanggaran: Otoriter, pembungkaman pendapat, dan aksi sewenang-wenang.

Sila 5: Keadilan Sosial

Fokus Utama: Pemerataan kesempatan, kesejahteraan umum, dan hak-kewajiban adil.

Prinsip TKA: Perlindungan kelompok rentan dan kepedulian sosial bersama.

Bentuk pelanggaran: Korupsi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, dan monopoli.

Keterikatan Hierarkis & Organik Antarsila

Sila 1 → Sila 2: Nilai ketuhanan menuntut penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.



Sila 2 → Sila 3: Penghormatan atas manusia tanpa diskriminasi memperkuat rasa persatuan.



Sila 3 → Sila 4: Persatuan bangsa dikelola melalui cara-cara musyawarah yang demokratis.



Sila 4 → Sila 5: Keputusan demokratis diarahkan muaranya demi keadilan sosial rakyat.



Perspektif Pancasila Terhadap Hak Asasi Manusia



1. Hak Disertai Tanggung Jawab

Kebebasan individu dibatasi oleh ketertiban umum dan hak orang lain.

2. Anti-Individualisme Mutlak

Hak Asasi Manusia di Indonesia dijalankan seimbang dengan kewajiban asasi.

3. Penegakan Berkeadilan

Penyelesaian pelanggaran HAM dilakukan secara adil melalui supremasi hukum.

Periodisasi Perkembangan Demokrasi Indonesia

1945 – 1959

Demokrasi Parlementer

Peran parlemen dan partai sangat dominan; dinamika koalisi menyebabkan instabilitas kabinet.

1959 – 1965

Demokrasi Terpimpin

Kekuasaan terpusat pada presiden; terjadi pergeseran dari mekanisme demokrasi prosedural.

1965 – 1998

Demokrasi Pancasila Orba

Secara formal berlandaskan Pancasila, namun diwarnai pembatasan kebebasan politik.

1998 – SEKARANG

Era Reformasi

Penguatan checks and balances, Amandemen UUD 1945, serta jaminan HAM dan pemilu langsung.

Sikap Kritis–Selektif Menghadapi Globalisasi

1. Terbuka Terhadap Inovasi

Mengadopsi ilmu pengetahuan, teknologi digital, dan etos kerja produktif dari luar.

2. Menyaring Dampak Negatif

Menolak konsumerisme, radikalisme, intoleransi, dan berita hoaks pemecah belah.

3. Memperkuat Kepribadian Bangsa

Memanfaatkan media digital untuk mempromosikan kebudayaan nasional di kancah global.



5 Langkah Penyelesaian Studi Kasus TKA

LANGKAH 1

Identifikasi Masalah

Temukan inti konflik utama cerita.

LANGKAH 2

Pemetaan Nilai

Cari nilai Pancasila yang dilanggar.

LANGKAH 3

Penentuan Sila

Korelasikan dengan sila paling relevan.

LANGKAH 4

Analisis Dampak

Uji konsekuensi tiap pilihan opsi.

LANGKAH 5

Solusi Solutif

Pilih jawaban paling adil & persuasif.



Siap Menghadapi TKA Pendidikan Pancasila 2026

Kunci sukses TKA bukan sekadar menghafal teks, melainkan melatih nalar kritis dalam menghubungkan prinsip Pancasila dengan realitas sosial.

✓ Kuasai Tanggal Sejarah

✓ Bedakan 4 Peran Utama

✓ Terapkan Metodologi Kasus

Image Sources



<https://cdn.observerid.com/2019/08/Screen-Shot-2019-08-16-at-11.35.22-PM.png>

Source: observerid.com



https://media.easy-peasy.ai/27d31bcc-1204-4ac2-914b-d05fa47a9116/204da782-8b76-4c8e-ab46-0b3e0696f7ef_medium.webp

Source: easy-peasy.ai



<https://www.eschoolnews.com/files/2026/09/AI-digital-literacy.png>

Source: www.eschoolnews.com

SOAL NOMOR 1 S.d 10 ADALAH PILIHAN GANDA KOMPLEK

1. SOAL (Capaian: Definisi & Syarat Pemilih Pemula)

Seorang warga negara memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam Pemilu sebagai pemilih pemula. Berdasarkan materi modul ajar Pendidikan Pancasila Kelas XII, manakah dari pernyataan berikut yang secara akurat menggambarkan kriteria dan karakteristik seorang pemilih pemula? **(Pilihlah 3 jawaban benar).**

- A. Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada hari pemungutan suara genap berusia 17 tahun atau lebih.
- B. WNI yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah atau pernah menikah.
- C. Seseorang yang telah menggunakan hak pilihnya minimal dalam dua kali pelaksanaan Pemilu Presiden sebelumnya.
- D. WNI yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi resmi (Pemilu Presiden, DPR/DPD/DPD, maupun Pilkada).
- E. Kelompok masyarakat yang tertutup dari teknologi digital dan media sosial.

2. SOAL (Capaian: Demografi & Peran Strategis Pemilih Muda)

Berdasarkan data modul ajar, proporsi pemilih muda (Gen Z dan Milenial) mencapai lebih dari 52% dari total pemilih. Manakah dari pernyataan berikut yang menjelaskan alasan mengapa angka tersebut sangat krusial bagi masa depan demokrasi Indonesia? **(Pilihlah 3 jawaban benar)**

- A. Pemilih muda merupakan mayoritas mutlak pemilik suara sah yang menjadi penentu kemenangan utama dalam Pemilu.
- B. Suara pemilih muda menjadi penentu arah kebijakan publik terkait pendidikan, lapangan kerja, dan ekonomi digital.
- C. Pemilih muda menjadi pelopor dan game changer dalam mewujudkan integritas Pemilu yang bersih dari money politics.
- D. Jumlah pemilih muda yang besar menjamin bahwa seluruh kontestan politik pasti bersikap jujur tanpa perlu diawasi.
- E. Pemilih muda tidak berdampak apa pun terhadap legitimasi pemerintahan yang terpilih.

3. SOAL (Capaian: Tujuan Partisipasi Demokrasi)

Partisipasi aktif pemilih pemula di TPS bukan sekadar formalitas pencoblosan, melainkan memiliki tujuan mendasar dalam ketatanegaraan. Manakah yang termasuk ke dalam tujuan utama partisipasi warga negara dalam demokrasi? **(Pilihlah 3 jawaban benar)**

- A. Menjamin legitimasi pemerintahan sehingga pemimpin terpilih mendapat dukungan rakyat yang kuat secara hukum dan moral.
- B. Mewujudkan kedaulatan rakyat dengan membuktikan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, bukan elit politik semata.
- C. Membawa aspirasi generasi muda (pendidikan berkualitas, lingkungan hidup, teknologi) ke dalam agenda prioritas pemerintah.
- D. Memastikan bahwa salah satu pasangan calon dapat berkuasa secara mutlak tanpa pengawasan parlemen.
- E. Mengurangi jumlah anggaran pemilu yang harus dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

4. SOAL (Capaian: Prinsip Pemilu LUBER JURDIL)

Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia wajib memegang teguh asas LUBER JURDIL. Manakah dari pasangan prinsip dan penerapannya di bawah ini yang paling tepat? **(Pilihlah 3 jawaban benar)**

- A. Langsung: Pemilih memberikan suara secara pribadi tanpa perantara atau diwakilkan kepada orang lain.
- B. Bebas: Pemilih menentukan pilihannya tanpa ada tekanan, intimidasi, atau paksaan dari pihak manapun.
- C. Jujur & Adil: Penyelenggara pemilu, aparat, dan kontestan bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku tanpa kecurangan.
- D. Rahasia: Pilihan politik pemilih di dalam bilik suara wajib diumumkan secara publik di media sosial sebelum dicoblos.
- E. Umum: Pemilu hanya diperuntukkan bagi warga negara yang memiliki tingkat pendidikan minimal SMA.

5. SOAL (Capaian: Analogi Kritis "Pengemudi Bus")

Dalam modul ajar digunakan analogi "Memilih Pengemudi Bus Bersama" untuk menjelaskan pentingnya menggunakan hak pilih. Berdasarkan analogi tersebut, manakah interpretasi yang benar terkait dampak dari sikap masyarakat? **(Pilihlah 2 jawaban benar)**

- A. Ikut Memilih: Berperan aktif memastikan pengemudi (pemimpin) memiliki SIM (syarat hukum), jujur, dan berpengalaman demi keselamatan penumpang (bangsa).
- B. Sikap Apatis (Golput): Menyerahkan kemudi pada orang acak, lalu pasrah apabila bus tersesat atau mengalami kecelakaan di tengah jalan.
- C. Sikap Apatis (Golput): Memastikan bus tetap berjalan aman karena tidak memihak pengemudi manapun.
- D. Ikut Memilih: Membiarkan pengemudi mengendarai bus tanpa perlu mengecek rekam jejaknya.

6. SOAL (Capaian: Analisis Dampak Pemilih Aktif vs Golput)

Perhatikan tabel perbandingan indikator antara Pemilih Aktif & Cerdas dengan Sikap Apatis / Golput. Pernyataan manakah yang BENAR mengenai perbedaan konsekuensi dari kedua sikap tersebut? **(Pilihlah 3 jawaban benar)**

- A. Pemilih aktif menghasilkan legitimasi pemimpin yang sangat kuat dan didukung mayoritas rakyat, sedangkan Golput membuat legitimasi rawan digugat rasa tidak percaya.
- B. Pemilih aktif mendorong kebijakan publik yang pro-rakyat dan transparan, sementara Golput berpotensi melahirkan kebijakan yang memihak kelompok elit.
- C. Pemilih aktif tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menuntut dan mengawasi kinerja pejabat terpilih, sedangkan kelompok Golput kehilangan hak moral dalam mengkritik pemerintah.
- D. Sikap Golput justru meningkatkan kualitas transparansi penganggaran daerah APBD secara otomatis.
- E. Pemilih aktif hanya menguntungkan penyelenggara pemilu, tidak ber dampak pada kebijakan umum.

7. SOAL (Capaian: Evaluasi Kasus Politik Uang / Etika Pancasila)

Studi Kasus: Dalam sebuah narasi studi kasus PBL, beredar isu di TikTok bahwa pasangan calon membagikan voucher pulsa gratis kepada para pelajar berusia 17 tahun agar memilih mereka. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan norma hukum, manakah evaluasi kritis yang tepat atas tindakan tersebut? **(Pilihlah 3 jawaban benar)**

- A. Tindakan tersebut merusak keadilan sosial (Sila ke-5) karena mengandalkan kekuatan materi/ uang untuk membeli suara.
- B. Praktik tersebut mencederai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan (Sila ke-4) karena merendahkan martabat pemilih dan integritas Pemilu.
- C. Tindakan pembagian voucher pulsa merupakan bentuk wujud kepedulian sosial calon yang patut diapresiasi oleh pemilih muda.

- D. Praktik politik uang merupakan pelanggaran hukum Pemilu yang wajib ditolak dan dilaporkan oleh pemilih berintegritas.
- E. Menerima pulsa gratis dibolehkan asal pada saat pencoblosan tetap memilih calon yang lain.

8. SOAL (Capaian: Solusi Digital Menangkal Hoaks Politik)

Generasi muda sangat aktif di media sosial namun rentan terpapar disinformasi/hoaks politik. Langkah- langkah konkrit dan efektif apa yang dapat dilakukan seorang pemilih pemula di media sosial untuk menepis hoaks kampanye? **(Pilihlah 3 jawaban benar).**

- A. Melakukan cek fakta melalui situs verifikasi resmi seperti KPU, Bawaslu, atau platform Cek Fakta sebelum mempercayai informasi.
- B. Mengunggah konten edukasi politik yang kreatif, kritis, dan berdasar data untuk mengedukasi teman sebaya.
- C. Menerapkan prinsip "Saring Sebelum Sharing" dan tidak menyebarkan berita bernuansa provokatif tanpa verifikasi.
- D. Langsung membagikan (share) setiap unggahan yang viral tanpa peduli kebenaran sumbernya.
- E. Membalas hoaks politik dengan membuat narasi ujaran kebencian baru.

9. SOAL (Capaian: Sintaks Model Problem-Based Learning)

Pembelajaran modul ini menggunakan model Problem-Based Learning (PBL) alokasi waktu 2 x 45 menit. Aktivitas manakah yang termasuk ke dalam sintaks/tahapan PBL dalam modul tersebut? **(Pilihlah 3 jawaban benar).**

- A. Orientasi & Organisasi: Membentuk kelompok (4-5 orang) dan menganalisis akar masalah fenomena apatisisme/politik uang.
- B. Penyelidikan Kasus: Mencari literasi hukum (UU Pemilu/Pancasila) mengenai bahaya politik uang dan cara menepis hoaks.
- C. Penyajian & Evaluasi: Menyajikan karya gagasan (Solusi Digital/Poster) dan merefleksikan solusi antar kelompok.
- D. Guruh memberikan ceramah satu arah selama 90 menit penuh tanpa diskusi kelompok.
- E. Siswa melakukan pemungutan suara ulang untuk menteri pendidikan nasional di dalam kelas.

10. SOAL (Capaian: Komitmen Rencana Aksi Pemilih Cerdas)

Sebagai penutup pembelajaran, peserta didik diharapkan memiliki komitmen menjadi pemilih yang cerdas dan berintegritas. Manakah dari pilihan berikut yang mencerminkan sikap dan tindakan pemilih cerdas? **(Pilihlah 3 jawaban benar)**

- A. Memilih calon pimpinan berdasarkan rekam jejak (track record) kinerja dan gagasan konkrit, bukan karena ikutan tren sesaat.
- B. Menolak segala bentuk godaan materi atau politik uang yang bertujuan memengaruhi kebebasan memilih.
- C. Menggunakan hak pilih dengan datang ke TPS dan tidak mengambil pilihan untuk Golput.
- D. Menentukan pilihan hanya berdasarkan ketampanan/kecantikan atau popularitas calon di media sosial semata.
- E. Mengajak teman-teman sebaya untuk bersikap apatis karena menganggap semua politisi sama saja.

SOAL NOMOR 11 S.d 50 ADALAH PILIHAN GANDA BIASA

11. STIMULUS / CERITA KASUS:

Di Desa Suka Makmur yang masyarakatnya multikultural, pemuda dari komunitas Muslim dan Hindu membentuk forum pemuda inklusif. Saat perayaan Hari Raya Nyepi, pemuda

Muslim turut menjaga ketenangan desa dan membantu kelancaran pengamanan. Sebaliknya, saat Hari Raya Idul Fitri, pemuda Hindu membantu pengaturan parkir dan keamanan di sekitar area lapangan salat Eid. Kegiatan ini dipadukan dengan kerja bakti rutin perbaikan fasilitas jalan desa secara gotong royong.

Pertanyaan:

Mengapa aktivitas gotong royong dan saling menjaga antar-umat beragama tersebut menjadi pilar utama dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI?

- A. Menggantikan hukum formal negara dengan kesepakatan sosial adat di tingkat desa.
- B. Menghapuskan perbedaan dogmatis keyakinan agama demi menyamakan budaya lokal.
- C. Membangun modal sosial berupa rasa saling percaya (social trust) dan mengikis prasangka SARA.
- D. Menunjukkan dominasi peran kelompok mayoritas dalam mengatur ketertiban kelompok minoritas.
- E. Mengurangi beban kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan keamanan publik.

12. STIMULUS / CERITA KASUS:

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), media sosial diramaikan oleh sirkulasi narasi hoaks dan ujaran kebencian berlatar belakang SARA yang berpotensi membelah warga. Merespons situasi ini, sekelompok mahasiswa dan pemuda membentuk Satuan Tugas 'Literasi Digital Pemuda' untuk melakukan verifikasi fakta (fact-checking) secara terbuka, mengedukasi masyarakat agar bijak bermedia sosial, serta menyebarkan kampanye perdamaian.

Pertanyaan:

Berdasarkan analisis situasi di atas, alasan mendasar mengapa aksi komunitas muda tersebut dapat memperkuat keutuhan NKRI adalah...

- A. Mencegah terjadinya polarisasi sosial dan disintegrasi bangsa akibat manipulasi informasi digital.
- B. B. Membantu salah satu pasangan calon kepala daerah agar terhindar dari kampanye hitam.
- C. C. Membatasi hak kebebasan berpendapat masyarakat di ruang publik media sosial.
- D. D. Mengambil alih tugas dan wewenang lembaga pengawas Pemilu dalam penegakan hukum siber.
- E. E. Menyeragamkan seluruh pandangan politik warga negara agar selaras dengan narasi pemerintah

13. STIMULUS / CERITA KASUS:

Saat bencana gempa bumi hebat menimpa suatu wilayah di Indonesia, ratusan relawan pemuda dari berbagai provinsi di Sumatra, Kalimantan, dan Papua secara sukarela datang membawa bantuan medis, logistik, serta pendampingan psikososial. Mereka bekerja bahu-membahu bersama warga setempat tanpa memandang latar belakang etnis maupun agama.

Pertanyaan:

Analisis yang paling tepat mengenai alasan aksi kemanusiaan lintas daerah ini memperkuat persatuan nasional secara mendasar adalah...

- A. Membuktikan bahwa daerah yang terkena bencana tidak memiliki kapasitas kemandirian dalam penanggulangan bencana.
- B. Memperkuat ikatan emosional (emotional bonding) dan rasa persaudaraan nasib sepenanggungan sebagai satu bangsa.
- C. Menghapus kearifan dan identitas budaya lokal daerah terdampak demi menyamakan standar bantuan.
- D. Menggantikan peran serta tanggung jawab utama pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran bencana.

- E. Menjadi sarana pembuktian keunggulan budaya daerah relawan dibanding budaya daerah korban bencana.

14. STIMULUS / CERITA KASUS:

Terjadi sengketa pemanfaatan lahan antara masyarakat adat setempat dengan pihak pengembang investasi. Konflik yang memanas ini akhirnya diselesaikan melalui musyawarah inklusif yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, dengan melibatkan tokoh adat, akademisi, dan perwakilan perusahaan. Musyawarah menghasilkan kesepakatan pembagian zona kelola yang menghormati hak ulayat sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Pertanyaan:

Alasan utama mengapa penyelesaian konflik melalui musyawarah mufakat ini mampu memperkuat keutuhan NKRI adalah...

- A. Mengutamakan aspek pertumbuhan ekonomi semata di atas hak konstitusional masyarakat.
- B. Menekan masyarakat adat agar bersedia mengalah demi kelancaran proyek investasi skala besar.
- C. Menyelaraskan perlindungan hak-hak warga dengan kepentingan nasional secara adil dan beradab.
- D. Mengabaikan hukum positif negara dan menggantikannya dengan keputusan sepihak tokoh adat.
- E. Memindahkan seluruh pemukiman warga adat ke lokasi baru agar tidak mengganggu investor.

15. STIMULUS / CERITA KASUS:

Kementerian Pertahanan membuka pendaftaran Komponen Cadangan (Komcad) yang diikuti oleh ribuan warga sipil dari berbagai profesi (dosen, petani, karyawan, hingga aktivis). Para peserta mendapatkan pelatihan dasar militer untuk siap sedia mendukung Komponen Utama (TNI) saat negara dalam keadaan darurat militer atau ancaman kedaulatan.

Pertanyaan:

Mengapa partisipasi warga sipil dalam Komponen Cadangan ini memperkuat persatuan dan pertahanan negara dalam konteks Sishankamrata?

- A. Mengubah bentuk negara Indonesia dari negara hukum (rechtstaat) menjadi negara kekuasaan berbasis militer.
- B. Menanamkan kesadaran kolektif bahwa pertahanan kedaulatan negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional setiap warga.
- C. Menggantikan peran prajurit TNI profesional dalam menjaga garis batas wilayah NKRI.
- D. Mewajibkan seluruh masyarakat sipil untuk menggunakan pakaian militer dalam kehidupan sehari-hari.
- E. Membatasi partisipasi masyarakat sipil dalam kegiatan pengembangan ekonomi dan politik demokrasi.

16. STIMULUS / CERITA KASUS:

Pasukan Perdamaian Kontingen Garuda (TNI) yang ditugaskan dalam misi perdamaian PBB di kawasan konflik internasional tidak hanya bertugas mengamankan wilayah, tetapi juga mendirikan fasilitas medis gratis, mengajar di sekolah lokal, serta mempromosikan kebudayaan ramah khas Indonesia. Pendekatan humanis ini mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat internasional dan PBB.

Pertanyaan:

Dampak positif dari pelaksanaan misi kemanusiaan dan perdamaian dunia ini terhadap persatuan internal bangsa Indonesia adalah...

- A. Memperkuat kebanggaan nasional (national pride) dan soliditas warga sebagai bangsa yang berkontribusi aktif bagi kemanusiaan.

- B. Menunjukkan bahwa militer Indonesia lebih superior dibanding kekuatan militer negara-negara adidaya.
- C. Mengalihkan perhatian publik dalam negeri dari isu-isu pemenuhan hak ekonomi masyarakat.
- D. Menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya penentu kebijakan politik luar negeri di kawasan konflik.
- E. Mengurangi alokasi anggaran pembangunan nasional karena terserap penuh untuk biaya misi internasional.

17. STIMULUS / CERITA KASUS:

Sejumlah pemuda sarjana bergabung dalam program pengabdian di wilayah perbatasan (daerah 3T - Tertinggal, Terdepan, Terluar). Mereka tidak hanya mengajar anak-anak sekolah dasar, tetapi juga melatih masyarakat lokal mengelola potensi sumber daya alam dan memanfaatkan teknologi informasi untuk memasarkan produk lokal.

Pertanyaan:

Mengapa aktivitas pemberdayaan di daerah perbatasan tersebut dapat memperkuat keberadaan NKRI?

- A. Mengurangi ketergantungan wilayah perbatasan terhadap sistem administrasi pemerintah pusat.
- B. Mengikis keterbelakangan dan ketimpangan sosial serta menguatkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap tanah air.
- C. Menghapuskan hak otonomi daerah bagi wilayah perbatasan agar dikendalikan langsung oleh pemuda relawan.
- D. Mendorong daerah perbatasan untuk menjadi wilayah independen yang berorientasi pada perdagangan asing.
- E. Mengisolasi masyarakat perbatasan dari pengaruh budaya dan interaksi dengan negara tetangga.

18. STIMULUS / CERITA KASUS:

Di sebuah SMA Negeri unggulan di Jakarta, para siswa berasal dari berbagai suku bangsa seperti Papua, Minang, Dayak, dan Jawa. Saat berdiskusi kelompok maupun berkomunikasi informal di lingkungan sekolah, mereka sepakat menggunakan Bahasa Indonesia secarasantun, tanpa mengesampingkan kebanggaan pada bahasa daerah asal masing-masing.

Pertanyaan:

Analisis yang paling tepat mengenai alasan penggunaan Bahasa Indonesia dalam situasi tersebut dapat memperkuat persatuan bangsa adalah...

- A. Bahasa Indonesia merupakan sarana komunikasi inklusif yang mengintegrasikan keragaman tanpa menghilangkan identitas kultural lokal.
- B. Bahasa daerah dianggap tidak memenuhi standar ilmiah dalam komunikasi akademik di sekolah.
- C. Penggunaan bahasa daerah di ruang publik dilarang oleh aturan perundang-undangan nasional.
- D. Bahasa Indonesia diciptakan untuk menggantikan seluruh bahasa daerah secara bertahap.
- E. Mencegah siswa daerah menggunakan bahasa asalnya agar lebih cepat berasimilasi dengan budaya mayoritas.

19. STIMULUS / CERITA KASUS:

Dalam perayaan Hari Kemerdekaan RI, sebuah sanggar seni pemuda menampilkan seni pertunjukan kolaboratif yang mengombinasikan tari Saman dari Aceh, musik Angklung dari Jawa Barat, dan tarian Cendrawasih dari Papua dalam satu rangkaian harmonik.

Pertanyaan:

Mengapa kreasi seni kolaboratif antar-etnis ini sangat efektif dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa?

- A. Menyamakan seluruh gerakan dan pakem tarian tradisional agar menjadi satu jenis tari tunggal.
- B. Menumbuhkan apresiasi silang budaya (cross-cultural appreciation) dan mengikis sikap etnosentrisme.
- C. Menunjukkan bahwa seni dari daerah tertentu memiliki nilai estetika lebih tinggi dari daerah lain.
- D. Mengubah kebudayaan daerah menjadi komoditas pariwisata komersial tanpa nilai edukasi.
- E. Menghilangkan ciri khas budaya lokal agar menyesuaikan dengan tren kebudayaan modern Barat.

20. STIMULUS / CERITA KASUS:

Guna menghadapi dinamika resesi ekonomi global, kelompok masyarakat dan Gerakan Pemuda secara masif mengampanyekan gerakan 'Bangga Buatan Indonesia' dengan memprioritaskan pembelian produk UMKM lokal, seperti sepatu kulit cibaduyut, kain batik daerah, dan kopi nusantara.

Pertanyaan:

Mengapa gerakan ekonomi kerakyatan ini berkontribusi nyata terhadap kukuhnya persatuan dan kesatuan nasional?

- A. Mengisolasi total perekonomian nasional dari rantai pasok dan kerja sama perdagangan internasional.
- B. Memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan menumbuhkan solidaritas solidaritas ekonomi antar-warga negara.
- C. Mewajibkan pemerintah untuk menanggung seluruh biaya operasional pelaku UMKM di Indonesia.
- D. Menurunkan kualitas standar barang lokal agar mampu bersaing harga dengan barang impor.
- E. Menghentikan alih teknologi industri dari negara luar ke produsen lokal dalam negeri.

21. STIMULUS / CERITA KASUS:

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkada) berlangsung sangat ketat dan sempit memicu persaingan antar-keluarga pendukung. Namun, setelah pengumuman resmi hasil pemungutan suara, calon yang belum terpilih beserta pendukungnya mendatangi rumah pemenang untuk memberikan selamat dan menyatakan kesiapan berkolaborasi memajukan desa.

Pertanyaan:

Tindakan rekonsiliasi politik di tingkat lokal tersebut memperkuat persatuan dan kesatuan karena...

- A. Menunjukkan bahwa hasil pemilihan umum tidak memiliki makna penting dalam tata kelola desa.
- B. Menghapuskan perbedaan pandangan dan pilihan politik warga secara paksa.
- C. Mengedepankan kedewasaan berdemokrasi dan menempatkan keharmonisan sosial di atas kepentingan golongan.
- D. Menyerahkan seluruh jabatan strategis desa kepada calon yang kalah untuk menghindari keributan.
- E. Mengabaikan berbagai prosedur hukum dan norma tata tertib pemilihan yang berlaku.

22. STIMULUS / CERITA KASUS:

Berbagai komunitas pemuda dari berbagai latar belakang suku dan agama berkumpul di wilayah pesisir untuk melaksanakan program penanaman 10.000 bibit mangrove dan pembersihan sampah plastik laut guna menanggulangi ancaman abrasi serta iklim.

Pertanyaan:

Mengapa kolaborasi aksi pemuda dalam isu lingkungan hidup tersebut menjadi sarana efektif pengikat persatuan bangsa?

- A. Menegaskan bahwa kelestarian lingkungan pesisir hanya menjadi beban pemuda di wilayah pantai.
- B. Membangun kesadaran kewargaan ekologis (ecological citizenship) berbasis tanggung jawab bersama atas ruang hidup tanah air.
- C. Mengalihkan perhatian publik dari kewajiban berbangsa dan bernegara di bidang hukum.
- D. Membuktikan bahwa pemerintah daerah tidak mampu menjalankan kewajiban perlindungan alam.
- E. Menutup seluruh kawasan pesisir dari kegiatan ekonomi dan pemukiman warga setempat.

23. STIMULUS / CERITA KASUS:

Pemerintah Kota X menerbitkan regulasi yang mewajibkan seluruh gedung fasilitas umum dan layanan publik dilengkapi dengan aksesibilitas ramah penyandang disabilitas (rampa, lantai pemandu, serta penerjemah bahasa isyarat di loket pelayanan).

Pertanyaan:

Alasan utama mengapa kebijakan pelayanan publik inklusif ini dapat memperkuat keutuhan NKRI adalah...

- A. Memberikan hak istimewa khusus yang mengurangi porsi hak warga negara nonsubjek disabilitas.
- B. Mengimplementasikan prinsip keadilan sosial dan menjamin kesetaraan hak konstitusional setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- C. Memenuhi tuntutan donor internasional agar daerah mendapat bantuan dana pembangunan.
- D. Menyeragamkan seluruh fasilitas publik tanpa melihat tingkat kebutuhan nyata masyarakat.
- E. Mengurangi anggaran penanganan kemiskinan di daerah demi membiayai fasilitas disabilitas.

24. STIMULUS / CERITA KASUS:

Untuk menghentikan perselisihan dan tawuran antar-pelajar yang sering berulang di suatu kawasan, Dinas Pendidikan membentuk Forum Liga Olahraga dan Seni Kreatif Antar-Sekolah. Melalui forum ini, siswa dari sekolah yang tadinya bermusuhan bertanding secara sportif dan berkolaborasi dalam proyek seni bersama.

Pertanyaan:

Pendekatan ini efektif memperkuat persatuan di kalangan generasi muda karena...

- A. Mengalihkan konflik fisik menjadi ajang persaingan yang lebih terselubung antar-sekolah.
- B. Merekonsiliasi prasangka kelompok (in-group bias) melalui interaksi positif dan rasa saling menghargai.
- C. Memberikan sanksi akademik yang memberatkan seluruh siswa tanpa proses klarifikasi.
- D. Mengurangi jam belajar mata pelajaran inti agar siswa fokus berolahraga sepanjang hari.
- E. Menghapuskan sistem kompetisi antar-sekolah secara permanen di seluruh daerah.

25. STIMULUS / CERITA KASUS:

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di suatu kabupaten mengadakan dialog berkala dan menyepakati seruan bersama untuk saling menghormati saat pelaksanaan ibadah Hari Raya Keagamaan yang kebetulan jatuh pada pekan yang sama.

Pertanyaan:

Mengapa keberadaan dialog dan seruan bersama antar-tokoh agama ini memperkuat keutuhan NKRI?

- A. Mencampuradukkan ajaran dan ritual keagamaan menjadi satu doktrin kepercayaan universal.
- B. Mencegah potensi gesekan sosial dengan mengedepankan komunikasi proaktif dan semangat toleransi aktif.
- C. Mengambil alih kewenangan aparat Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana SARA.
- D. Membatasi kebebasan warga dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.
- E. Menjadikan tokoh agama sebagai satu-satunya penentu kebijakan pembangunan fisik di daerah.

26. STIMULUS / CERITA KASUS:

Menghadapi tantangan perubahan iklim global yang mengancam ketahanan pangan, sekelompok peneliti perguruan tinggi nasional berhasil menemukan varietas padi unggul tahan kekeringan yang sanggup meningkatkan hasil panen petani lokal hingga dua kali lipat.

Pertanyaan:

Bagaimana karya riset dan inovasi sains nasional ini dapat memperkukuh pertahanan dan persatuan NKRI?

- A. Memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional dari ancaman krisis serta kebergantungan luar negeri.
- B. Menolak secara mutlak seluruh kerja sama internasional di bidang riset dan alih teknologi pangan.
- C. Mengharuskan petani di seluruh wilayah Indonesia untuk menggunakan satu varietas benih padi saja.
- D. Mengalihkan seluruh sektor perekonomian nasional menjadi sektor pertanian tradisional.
- E. Menghilangkan peran distributor dan pedagang pasar dalam rantai pasok pangan nasional.

27. STIMULUS / CERITA KASUS:

Pemerintah Desa Y secara terbuka memublikasikan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada baliho besar di depan kantor desa serta menyediakan portal publik online untuk pengaduan dan saran warga terkait pelaksanaan pembangunan desa.

Pertanyaan:

Mengapa transparansi tata kelola anggaran publik ini berdampak langsung pada penguatan persatuan warga desa?

- A. Mendorong warga untuk saling membandingkan kekayaan pribadi antar-tetangga di desa.
- B. Meningkatkan kepercayaan publik (public trust) serta mencegah prasangka buruk dan konflik horizontal.
- C. Menghilangkan wewenang aparat desa dalam mengeksekusi program pembangunan.
- D. Mengurangi keterlibatan badan pengawas independen dalam audit keuangan desa.
- E. Mengharuskan seluruh keputusan teknis pembangunan disetujui oleh 100% warga secara mutlak.

28. STIMULUS / CERITA KASUS:

Nelayan tradisional di wilayah Laut Natuna Utara tidak hanya berlayar untuk menangkap ikan, tetapi juga aktif memberikan informasi awal kepada patroli TNI AL saat mendeteksi keberadaan kapal asing yang melanggar batas wilayah kedaulatan Indonesia.

Pertanyaan:

Alasan tindakan para nelayan tersebut memperkuat sistem pertahanan dan persatuan NKRI adalah...

- A. Nelayan bertindak sebagai pasukan kombatan militer utama dalam pertempuran laut terbuka.
- B. Nelayan memiliki wewenang yuridis penuh untuk menindak dan menangkap kapal asing di laut.
- C. Mewujudkan prinsip Sishankamrata melalui sinergi nyata antara warga sipil dan TNI dalam menjaga kedaulatan wilayah.
- D. Menggantikan seluruh operasional pengamanan laut yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
- E. Memaksa negara tetangga untuk menghentikan seluruh aktivitas pelayaran di kawasan internasional.

29. STIMULUS / CERITA KASUS:

Dalam rangka deradikalisasi, pemerintah bekerja sama dengan tokoh masyarakat merangkul mantan pelaku radikalisme (eks-napiter) dengan memberikan pendampingan ekonomi usaha mikro, pembekalan nilai-nilai Pancasila, serta ruang reintegrasi yang aman di tengah masyarakat.

Pertanyaan:

Mengapa pendekatan pemulihan (restoratif) ini sangat penting dalam memperkokoh persatuan dan keutuhan bangsa?

- A. Membiarkan berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila di ruang publik.
- B. Memutus rantai kejahatan radikalisme dengan memulihkan hak kemanusiaan dan merangkul kembali warga negara ke dalam pangkuan NKRI.
- C. Menghapuskan vonis hukuman pidana yang telah ditetapkan oleh lembaga peradilan negara.
- D. Menjadikan eks-pelaku kejahatan sebagai kelompok yang diprioritaskan melebihi korban kejahatan.
- E. Memutus saluran komunikasi antara eks-pelaku dengan seluruh anggota keluarga dan kerabatnya.

30. STIMULUS / CERITA KASUS:

Di suatu daerah kawasan industri yang dihuni oleh pendatang dari berbagai penjuru tanah air, dibentuk 'Dewan Adat Bersama' yang menghimpun ketua paguyuban dari seluruh suku. Ketika timbul gesekan perorangan antar-warga beda etnis, dewan ini segera melakukan mediasi kultural sebelum persoalan melebar.

Pertanyaan:

Dampak strategis pembentukan Dewan Adat Bersama ini terhadap pemeliharaan persatuan nasional adalah...

- A. Menggantikan institusi kepolisian dan pengadilan negeri dalam penyelesaian seluruh kasus hukum pidana.
- B. Menumbuhkan primordialisme dan sentiment etnis yang berlebihan di lingkungan kerja.
- C. Menyediakan wadah komunikasi dan penyelesaian konflik sosial secara dini berbasis kearifan lokal.
- D. Membatasi akses warga baru atau pendatang untuk berdomisili di wilayah kawasan industri tersebut.

- E. Membagi pemukiman warga berdasarkan asal-usul kedaerahan masing-masing suku.

31. Kasus:

Seorang aktivis media sosial sering menyuarakan kritik keras terhadap kebijakan pembangunan daerah. Suatu hari, ia mengunggah tulisan yang menuduh seorang pejabat daerah melakukan korupsi tanpa menyertakan bukti faktual. Unggahan tersebut memicu kegaduhan publik dan tuduhan pencemaran nama baik. Aktivis tersebut membela diri dengan alasan bahwa menyuarakan pendapat adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin konstitusi.

Berdasarkan perspektif Pancasila, bagaimana Anda menganalisis tindakan aktivis tersebut dalam hal keseimbangan hak dan kewajiban warga negara?

- A. Tindakan tersebut sepenuhnya benar karena kebebasan berpendapat berada di atas aturan hukum pidana.
- B. Tindakan tersebut melanggar kewajiban menghormati hak orang lain karena kebebasan berpendapat dibatasi oleh kebenaran dan tanggung jawab moral.
- C. Aktivis tersebut tidak bersalah selama kritik yang disampaikan bertujuan untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah.
- D. Pemerintah daerah seharusnya mengabaikan unggahan tersebut agar tidak dianggap mengekang hak asasi warga negara.
- E. Kebebasan berpendapat harus dihentikan secara total apabila berpotensi menimbulkan kritik terhadap pejabat publik.

32. Kasus:

Sebuah perusahaan tekstil besar di kawasan perdesaan mengalami penurunan pendapatan akibat krisis ekonomi global. Untuk bertahan, manajemen memotong upah buruh secara sepihak di bawah UMR. Para buruh kemudian melakukan aksi mogok kerja yang melumpuhkan operasional pabrik. Di sisi lain, pemilik pabrik mengancam akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal jika aksi tetap berlanjut.

Jika dianalisis melalui nilai Instrumental dan Praksis Pancasila (khususnya Sila Musyawarah dan Keadilan Sosial), solusi terbaik yang menyeimbangkan hak buruh dan kewajiban perusahaan adalah...

- A. Perusahaan berhak memotong upah secara permanen demi menyelamatkan aset bisnis dari kebangkrutan.
- B. Buruh berhak menuntut kenaikan upah di atas UMR tanpa mempedulikan kondisi finansial perusahaan.
- C. Melakukan musyawarah bipartit untuk menyepakati penyesuaian kerja sementara yang adil tanpa melanggar regulasi dasar kemanusiaan.
- D. Pemerintah langsung mengambil alih kepemilikan pabrik untuk menjamin seluruh hak buruh terpenuhi.
- E. Membiarkan mekanisme pasar bebas menentukan nasib kelanjutan hubungan kerja antara buruh dan pengusaha.

33. Kasus:

Di sebuah pemukiman padat penduduk, sekelompok warga mendirikan tempat peribadatan tanpa melengkapi izin mendirikan bangunan (IMB) sesuai peraturan daerah setempat. Sebagian warga sekitar merasa keberatan karena kekhawatiran akan gangguan ketertiban lalu lintas. Namun, kelompok jamaah tetap berargumentasi bahwa hak beribadah adalah HAM mutlak yang tidak boleh diatur oleh regulasi administratif apapun.

Bagaimana nilai Sila Pertama dan Sila Ketiga Pancasila menuntun penyelesaian atas pertentangan hak dan kewajiban ini?

- A. Hak beribadah harus dibatalkan apabila ada satu saja warga sekitar yang merasa tidak nyaman.
- B. Regulasi administratif IMB dapat diabaikan demi menjamin kebebasan beragama yang seluas-luasnya.

- C. Kebebasan menjalankan ibadah wajib dihormati, namun pelaksanaannya harus tunduk pada kesepakatan sosial dan ketertiban hukum demi menjaga persatuan.
- D. Pemerintah wajib memindahkan pemukiman warga sekitar agar tempat peribadatan tersebut dapat berdiri tegak.
- E. Tempat ibadah tersebut harus segera dibongkar paksa tanpa perlu memberikan solusi fasilitas pengganti bagi jamaah.

34. Kasus:

Sebuah wilayah hutan adat dialihfungsikan menjadi kawasan pertambangan oleh perusahaan swasta yang telah mengantongi izin resmi dari pemerintah pusat. Pembangunan pertambangan ini berpotensi meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja. Namun, masyarakat adat menolak keras karena proyek tersebut merusak ekosistem tradisional dan menghilangkan sumber penghidupan mereka.

Analisislah situasi ini berdasarkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia!

- A. Pembangunan pertambangan harus diprioritaskan karena memberikan kontribusi ekonomi nasional yang jauh lebih besar.
- B. Hak masyarakat adat atas lingkungan hidup yang bersih dan berkelanjutan harus diintegrasikan dengan cara mengevaluasi izin tambang serta pelibatan warga lokal.
- C. Masyarakat adat harus mengalah demi kepentingan pembangunan infrastruktur nasional.
- D. Perusahaan tambang berhak mengusir masyarakat adat demi kelancaran proyek yang berizin legal.
- E. Seluruh kegiatan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam harus dihentikan total di Indonesia.

35. Kasus:

Pemerintah memberlakukan kebijakan wajib pajak yang ketat bagi para pengusaha muda dan pelaku UMKM digital. Sebagian pelaku UMKM merasa keberatan dan menganggap pajak membatasi hak mereka untuk menikmati hasil usaha secara maksimal. Padahal, dana pajak tersebut digunakan untuk membiayai beasiswa pendidikan dan subsidi kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Bagaimana peran Pancasila dalam menjelaskan hubungan antara kewajiban membayar pajak dan hak warga negara dalam stimulus di atas?

- A. Pembayaran pajak merupakan bentuk pemaksaan negara yang mengurangi hak milik pribadi warga negara.
- B. Kewajiban membayar pajak merupakan wujud solidaritas sosial untuk mewujudkan hak atas kesejahteraan bersama sesuai Sila Kelima Pancasila.
- C. Warga negara berhak menolak bayar pajak jika tidak menggunakan fasilitas publik secara langsung.
- D. Pemerintah seharusnya tidak memungut pajak dari UMKM agar iklim usaha dapat tumbuh tanpa beban.
- E. Hak mendapat subsidi kesehatan hanya diberikan kepada warga negara yang terbukti membayar pajak berkat kontribusinya.

36. Kasus:

Dalam sebuah diskusi publik, timbul perdebatan mengenai batas akses internet dan perlindungan data pribadi. Pemerintah merencanakan pemblokiran platform digital tertentu yang terindikasi memuat konten judi online dan pornografi. Sebagian publik menilai pemblokiran tersebut membatasi hak asasi warga negara dalam mengakses informasi.

Analisislah tindakan pembatasan oleh pemerintah tersebut berdasarkan Pasal 28J UUD 1945 yang berakar dari nilai-nilai Pancasila!

- A. Pembatasan hak akses informasi tidak dibenarkan sama sekali dalam negara demokrasi modern.
- B. Pemerintah berhak membatasi hak individu demi melindungi moral publik, keamanan, dan ketertiban umum sesuai nilai Pancasila.
- C. Setiap warga negara bebas mengunggah dan mengakses konten apapun tanpa batasan etika dan hukum.
- D. Pemblokiran platform digital hanya boleh dilakukan jika seluruh pengguna internet menyetujuinya.
- E. Hak atas informasi berada di atas segala pertimbangan moral dan nilai agama yang berlaku di masyarakat.

37. Kasus:

Pada masa pandemi atau krisis kesehatan global, pemerintah mengeluarkan aturan wajib vaksinasi dan pembatasan kegiatan publik (karantina). Seorang warga menolak divaksin dengan alasan hak atas tubuh sendiri (body autonomy) adalah HAM yang mutlak dan tidak boleh diintervensi oleh negara.

Bagaimana Anda menilai sikap warga tersebut berdasarkan konsep keadilan dan kemanusiaan Pancasila?

- A. Sikap warga tersebut sepenuhnya dapat dibenarkan karena HAM bersifat mutlak tanpa batas.
- B. Negara melanggar HAM apabila memaksa warga negara mengikuti program kesehatan umum.
- C. Hak pribadi atas tubuh dibatasi oleh kewajiban moral untuk melindungi hak hidup dan kesehatan orang lain di sekitarnya.
- D. Warga yang menolak vaksinasi harus dicabut kewarganegaraannya secara permanen.
- E. Pemerintah harus menghentikan program kesehatan massal demi menghormati keputusan individu.

38. Kasus:

Sebuah kelompok mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di jalan protokol depan pusat perbelanjaan untuk memprotes kenaikan harga bahan pokok. Aksi ini berlangsung hingga malam hari dan menutup total arus lalu lintas, sehingga menyebabkan kemacetan parah serta mengganggu ambulans yang sedang membawa pasien kritis.

Manakah analisis yang paling tepat mengenai keseimbangan hak dan kewajiban dalam dinamika demonstrasi tersebut?

- A. Hak mengemukakan pendapat mahasiswa harus didahulukan meskipun mengorbankan keselamatan pasien di ambulans.
- B. Polisi seharusnya melarang seluruh bentuk demonstrasi di jalan umum untuk selamanya.
- C. Mahasiswa menggunakan hak berpendapatnya, namun mengabaikan kewajiban menghormati hak masyarakat lain atas jalan raya dan keselamatan.
- D. Pengendara jalan raya tidak memiliki hak untuk diprioritaskan dibandingkan kepentingan aksi mahasiswa.
- E. Kemacetan lalu lintas merupakan akibat wajar yang harus ditanggung masyarakat tanpa perlu adanya evaluasi aksi.

39. Kasus:

Pemerintah meluncurkan program Digitalisasi Sekolah di kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Namun, di beberapa daerah, sarana listrik belum memadai dan kearifan lokal setempat membatasi penggunaan perangkat elektronik pada anak-anak.

Bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan yang adil dapat diselaraskan dengan kewajiban menjaga nilai-nilai Pancasila di kawasan tersebut?

- A. Memaksa masyarakat lokal untuk segera menerima teknologi digital tanpa proses adaptasi budaya.
- B. Menghentikan seluruh bantuan pendidikan ke daerah 3T agar kearifan lokal tetap murni.
- C. Menyediakan sarana pendidikan yang adaptif dan berkualitas dengan menghormati serta melibatkan nilai-nilai kearifan lokal setempat.
- D. Memindahkan seluruh anak-anak dari kawasan 3T ke kota-kota besar untuk bersekolah.
- E. Menganggap daerah 3T tidak memerlukan pendidikan modern karena sudah memiliki tradisi sendiri.

40. Kasus:

Para tenaga medis di sebuah rumah sakit daerah berencana melakukan aksi mogok kerja massal karena tunjangan kesehatan mereka belum dibayarkan selama enam bulan. Namun, jika mereka mogok total, puluhan pasien di ruang perawatan intensif (ICU) berisiko kehilangan nyawa.

Bagaimana penerapan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila Kedua) dalam dilema etis ini?

- A. Tenaga medis berhak mogok total tanpa memedulikan kondisi pasien sampai seluruh tuntutan finansial dibayar.
- B. Rumah sakit berhak mengabaikan hak gaji tenaga medis demi alasan penghematan anggaran daerah.
- C. Tenaga medis menyampaikan tuntutan haknya melalui jalur hukum/perwakilan tanpa melalaikan kewajiban pelayanan dasar keselamatan jiwa pasien.
- D. Pasien harus dipindahkan ke rumah sakit lain secara mandiri tanpa dibantu oleh staf medis yang sedang mogok.
- E. Pemerintah daerah membubarkan organisasi profesi medis yang menuntut keadilan hak.

41. Kasus:

Dalam pemilihan Ketua OSIS di sebuah SMA, terdapat dua kandidat kuat. Candidate A menyebarkan rumor bohong (hoax) tentang kandidat B berbasis isu SARA untuk menjatuhkan kredibilitasnya. Pendukung kandidat A beralasan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan taktik politik yang wajar dalam persaingan.

Ditinjau dari perspektif Demokrasi Pancasila dan HAM, tindakan penyebaran rumor SARA tersebut adalah...

- A. Wajar dalam kontestasi politik karena tujuannya adalah memenangkan persaingan.
- B. Pelanggaran hak asasi kandidat B untuk mendapatkan perlindungan atas martabat dan nama baik.
- C. Bentuk penerapan kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh UU keterbukaan informasi.
- D. Strategi pendidikan politik yang efektif untuk melatih ketahanan mental para siswa.
- E. Hak kebebasan pers yang mutlak di lingkungan sekolah.

42. Kasus:

Sebuah platform perdagangan digital (e-commerce) memanfaatkan data transaksi konsumen untuk memetakan kebiasaan belanja tanpa izin tertulis dari pengguna. Data tersebut kemudian dijual ke pihak ketiga untuk kepentingan iklan terarah. Konsumen merasa hak kerahasiaan pribadinya dilanggar.

Analisislah kewajiban pelaku usaha digital berdasarkan prinsip Pancasila dalam melindungi hak konsumen!

- A. Pelaku usaha bebas memperjualbelikan data karena pengguna telah menggunakan platform secara gratis.

- B. Pelaku usaha berkewajiban menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi dan etika berbisnis yang berkeadilan.
- C. Konsumen tidak memiliki hak atas data pribadi saat bertransaksi di dunia digital.
- D. Negara tidak boleh mengatur tata kelola data pribadi agar pertumbuhan bisnis digital tidak terhambat.
- E. Konsumen berkewajiban merahasiakan identitasnya sendiri dengan tidak menggunakan fasilitas internet.

43. Kasus:

Di suatu daerah perkotaan, terjadi peningkatan pembangunan apartemen mewah secara masif. Pembangunan ini menyebabkan sumur-sumur warga di sekitarnya mengering karena penyedotan air tanah secara berlebihan oleh pengembang. Pengembang berargumen bahwa mereka memiliki izin usaha sah dan tanah tempat apartemen berdiri adalah milik pribadi.

Bagaimana Pancasila menyeimbangkan hak kepemilikan privat pengembang dengan kewajiban terhadap lingkungan masyarakat sekitar?

- A. Hak kepemilikan privat pengembang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh warga sekitar.
- B. Pengembang wajib menghentikan dampak buruk dan menyediakan akses air bersih bagi warga, karena hak milik berfungsi sosial (Sila Kelima).
- C. Warga sekitar harus mengalah dan membeli air bersih kemasan untuk kebutuhan sehari-hari.
- D. Pemerintah harus menutup seluruh pembangunan properti swasta di kawasan perkotaan.
- E. Pengembang bebas menggunakan sumber daya alam tanpa perlu memikirkan daya dukung lingkungan sekitar.

44. Kasus:

Pemerintah menetapkan kuota khusus (afirmasi) minimum 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan pencalonan anggota legislatif. Sebagian pihak menganggap aturan ini melanggar prinsip keadilan karena membatasi peluang bagi calon laki-laki yang mungkin memiliki kualifikasi lebih tinggi.

Analisislah kebijakan tindakan afirmatif (affirmative action) tersebut berdasarkan perspektif Keadilan Sosial dalam Pancasila!

- A. Kebijakan tersebut diskriminatif terhadap laki-laki sehingga bertentangan dengan Pancasila.
- B. Kebijakan tersebut merupakan instrumen keadilan korektif untuk setara menyeimbangkan hak kelompok yang historis tertinggal.
- C. Kuota perempuan seharusnya dihapuskan karena persaingan harus didasarkan pada kompetensi murni tanpa memandang gender.
- D. Perempuan seharusnya diberi kuota 100% untuk menggantikan seluruh posisi kepemimpinan laki-laki.
- E. Kebijakan tersebut tidak memiliki landasan filosofis dalam konstitusi Indonesia.

45. Kasus:

Seorang seniman membuat karya seni lukis kontroversial yang menampilkan simbol agama tertentu dengan cara yang dianggap melecehkan oleh pemeluk agama tersebut. Seniman tersebut mengklaim bahwa karyanya adalah bentuk kebebasan berekspresi seni yang dijamin oleh konstitusi dan HAM global.

Bagaimana kebebasan berekspresi seni dibatasi oleh kewajiban warga negara dalam perspektif Sila Ketiga dan Sila Pertama Pancasila?

- A. Kebebasan seni bersifat tanpa batas dan tidak boleh dipengaruhi oleh norma agama atau budaya setempat.

- B. Kebebasan ekspresi seni wajib memperhatikan batas toleransi, penghormatan atas nilai keagamaan, serta menjaga harmoni sosial.
- C. Seniman harus dipenjara seumur hidup tanpa melalui proses peradilan hukum yang adil.
- D. Karya seni harus dimusnahkan dan kegiatan kesenian di Indonesia dibatasi secara ketat oleh negara.
- E. Pemeluk agama harus mengabaikan setiap bentuk pelecehan demi menghormati hak asasi seniman.

46. Kasus:

Sesuai dengan amanat undang-undang, setiap perusahaan swasta wajib mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR). Namun, sebuah perusahaan tambang menolak menjalankan kewajiban ini dengan alasan mereka telah membayar pajak kepada negara.

Analisislah penolakan perusahaan tersebut ditinjau dari prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam Pancasila!

- A. Penolakan perusahaan dapat dibenarkan karena pembayaran pajak sudah menggantikan seluruh kewajiban sosial.
- B. Perusahaan berhak menikmati keuntungan sepenuhnya tanpa harus peduli pada lingkungan sekitar pabrik.
- C. Perusahaan wajib menjalankan CSR sebagai wujud tanggung jawab etis dan sosial atas pemanfaatan sumber daya publik demi keadilan bersama.
- D. Pemerintah harus membebaskan kewajiban pajak bagi perusahaan yang bersedia memberikan bantuan sosial.
- E. Merekrut warga lokal sebagai buruh kasar sudah cukup untuk menggantikan kewajiban CSR perusahaan.

47. Kasus:

Perkembangan teknologi AI (Kecerdasan Buatan) memungkinkan pembuatan video palsu yang sangat mirip dengan aslinya (deepfake). Seseorang membuat video deepfake tokoh publik yang berisi ajakan untuk merusak fasilitas umum dan membagikannya ke grup percakapan hingga menimbulkan kerusakan di beberapa kota.

Bagaimana fungsi Pancasila sebagai penyaring etis dalam menyikapi penyalahgunaan kebebasan digital ini?

- A. Menyebarkan informasi palsu adalah hak berekspresi yang tidak bisa dipidana dalam era digital.
- B. Kebebasan digital harus diimbangi kewajiban etis untuk memverifikasi kebenaran (integritas) demi mencegah perpecahan bangsa (Sila Ketiga).
- C. Penggunaan teknologi AI harus dilarang sepenuhnya di seluruh wilayah Indonesia.
- D. Warga negara tidak bertanggung jawab atas dampak dari konten digital yang disebarkannya.
- E. Kerusakan publik merupakan tanggung jawab penuh pihak kepolisian, bukan pembuat konten.

48. Kasus:

Seorang terduga pelaku pencurian ditangkap oleh warga desa. Karena emosi, massa menghakimi pelaku hingga luka berat sebelum polisi tiba di lokasi kejadian. Warga beralasan bahwa tindakan tersebut merupakan wujud penegakan keadilan secara cepat karena kekecewaan terhadap proses hukum yang dinilai lambat.

Analisislah tindakan main hakim sendiri (vigilante) tersebut berdasarkan prinsip negara hukum yang beradab (Sila Kedua dan Sila Keempat Pancasila)!

- A. Tindakan warga dibenarkan karena pelaku pencurian telah merugikan hak milik warga desa.

- B. Warga telah menjalankan kewajiban penegakan hukum secara swadaya untuk membantu polisi.
- C. Tindakan tersebut melanggar hak terduga pelaku atas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan mencederai nilai kemanusiaan yang beradab.
- D. Pelaku kejahatan otomatis kehilangan seluruh hak asasinya sebagai manusia.
- E. Polisi seharusnya membiarkan warga menyelesaikan masalah hukumnya sendiri.

49. Kasus:

Ancaman kedaulatan negara saat ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga berupa serangan siber terhadap data nasional dan penyebaran ideologi radikal yang mengancam kebinekaan. Pemerintah mengajak generasi muda untuk aktif dalam program bela negara digital.

Bagaimana peran generasi muda dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban bela negara di era modern?

- A. Wajib militer fisik adalah satu-satunya cara sah untuk memenuhi kewajiban bela negara.
- B. Generasi muda hanya memiliki hak untuk menikmati fasilitas digital tanpa beban kewajiban menjaga keamanan siber.
- C. Menggunakan literasi digital secara kritis untuk menangkal berita bohong dan radikalisme merupakan wujud kewajiban bela negara modern.
- D. Warga negara berhak menolak terlibat dalam upaya pertahanan negara karena itu tugas penuh TNI/Polri.
- E. Bela negara hanya wajib dilakukan apabila Indonesia sedang dalam kondisi perang terbuka.

50. Kasus:

Suatu pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang melarang kaum disabilitas untuk bekerja di sektor pelayanan publik daerah dengan alasan efisiensi kerja. Kebijakan ini memicu protes dari berbagai organisasi kemanusiaan.

Bagaimana Anda menganalisis Perda tersebut berdasarkan prinsip Pancasila dan HAM yang berlaku di Indonesia?

- A. Perda tersebut sah dan logis demi meningkatkan produktivitas dan efisiensi anggaran daerah.
- B. Perda tersebut diskriminatif dan melanggar hak asasi kaum disabilitas atas pekerjaan yang layak sesuai Sila Kedua dan Kelima.
- C. Kaum disabilitas seharusnya bekerja di sektor swasta saja agar tidak mengganggu pelayanan publik.
- D. Pemerintah daerah berhak membuat aturan apa saja tanpa terikat pada norma Pancasila dan undang-undang di atasnya.
- E. Protes organisasi kemanusiaan dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap otonomi daerah.

51. Stimulus:

Sebuah rancangan undang-undang (RUU) tentang tata kelola energi nasional memicu perdebatan publik. Sebagian kelompok mengkritik bahwa RUU tersebut memberikan porsi penguasaan sumber daya alam yang terlalu besar kepada investor asing tanpa menjamin akses energi terjangkau bagi masyarakat di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pemerintah berargumen bahwa investasi asing diperlukan untuk efisiensi teknologi dan percepatan pembangunan infrastruktur energi.

Pertanyaan:

Berdasarkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan staatsfundamentalnorm, manakah analisis yang paling tepat mengenai keselarasan RUU tersebut dengan nilai-nilai Pancasila?

- A. RUU tersebut sah secara konstitusional selama berorientasi pada pertumbuhan ekonomi nasional tanpa memandangkan keadilan sosial.
- B. RUU tersebut bertentangan dengan Sila Kelima karena mengabaikan kewajiban negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan penguasaan negara atas cabang produksi penting demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- C. RUU tersebut memuat pelanggaran Sila Kedua karena investasi asing secara otomatis merusak martabat dan hak asasi warga negara lokal.
- D. Kebijakan tersebut sepenuhnya sesuai dengan Sila Ketiga karena menarik modal asing merupakan langkah nyata menjaga keutuhan NKRI di mata internasional.
- E. Pembentukan RUU tersebut bertolak belakang dengan Sila Kesatu karena mengutamakan aspek materialistis di atas nilai-nilai spiritualitas bangsa.

52. Stimulus:

Dalam penyelesaian sengketa kewenangan antara lembaga negara (misalnya antara Lembaga Legislatif dan lembaga independen eksekutif), Mahkamah Konstitusi (MK) bertindak sebagai penguji perundang-undangan dan penafsir akhir konstitusi. Pada sebuah kasus, terjadi kebuntuan politik yang berpotensi melumpuhkan fungsi pelayanan publik. MK kemudian mengeluarkan putusan yang tidak hanya merujuk pada teks pasal UUD 1945, tetapi juga menggali nilai musyawarah mufakat dan keseimbangan kekuasaan (checks and balances).

Pertanyaan:

Analisislah peran Pancasila sebagai leitstar (bintang pengarah) dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut!

Perhatikan pernyataan berikut:

- (1) Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mengarahkan hakim untuk tidak hanya terpaku pada keadilan formal/tekstual, melainkan keadilan substantif.
- (2) Putusan MK mencerminkan penjelmaan Sila Ketiga dan Sila Keempat dengan mengedepankan keutuhan bangsa dan mekanisme demokratis yang bermartabat.
- (3) MK melampaui kewenangannya karena Pancasila tidak boleh dijadikan acuan hukum dalam memutus sengketa ketatanegaraan.
- (4) Penafsiran berbasis Pancasila menjamin bahwa hukum hadir sebagai alat penyelesaian konflik (conflict resolution) yang adil dan beradab.

Pernyataan yang benar adalah ...

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1), (2), dan (4)
- C. (1) dan (3) saja
- D. (2) dan (4) saja
- E. Semua pernyataan benar

53. Stimulus:

Pemerintah daerah kabupaten X menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang tata ruang kota yang secara sepihak membatasi penggunaan rumah ibadah bagi kelompok minoritas dengan alasan menjaga kerukunan dan ketertiban umum. Kebijakan ini menimbulkan protes keras dari kelompok masyarakat sipil karena dinilai mendiskriminasi hak beragama warga negara.

Pertanyaan:

Jika menganalisis kasus ini berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara dan hukum dasar pembentukan regulasi, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan secara ketatanegaraan adalah ...

- A. Membiarkan Perda tetap berlaku demi menjaga stabilitas politik lokal dan menghormati otonomi daerah yang seluas-luasnya.
- B. Melakukan uji materiil (judicial review) ke Mahkamah Agung karena Perda tersebut bertentangan dengan hierarki peraturan di atasnya dan Sila Kedua serta Sila Kesatu Pancasila.
- C. Mengadakan aksi demonstrasi massa untuk memblokir kantor pemerintah daerah sampai Perda dibatalkan secara paksa.
- D. Meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Perda tersebut secara langsung tanpa melalui prosedur legal yang berlaku.
- E. Mengubah status daerah tersebut menjadi wilayah otonom khusus agar hukum agama mayoritas dapat diberlakukan penuh.

54. Stimulus:

Di era digital, penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian berlatar belakang SARA meningkat tajam menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum. Fenomena ini memicu polarisasi tajam di tengah masyarakat dan berpotensi memecah belah persatuan nasional. Beberapa pihak mengusulkan pembatasan ketat terhadap kebebasan berpendapat di internet, sementara pihak lain menilai hal tersebut dapat mengancam demokrasi.

Pertanyaan:

Manakah kombinasi langkah yang paling mencerminkan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dalam menyikapi dilema antara kebebasan berpendapat dan integrasi nasional?

- (1) Negara menyusun regulasi tata kelola digital yang tegas namun transparan, sesuai nilai keadilan dan kemanusiaan yang beradab.
- (2) Mengembangkan literasi digital berbasis nilai Sila Ketiga untuk membangun rasionalitas dan rasa persaudaraan sesama warga negara.
- (3) Menutup seluruh akses media sosial secara permanen demi menjamin stabilitas keamanan nasional.
- (4) Membuka ruang dialog publik yang inklusif (Sila Keempat) untuk merumuskan batasan etik dan hukum dalam berpendapat di ruang siber.

Kombinasi yang tepat adalah ...

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1), (2), dan (4)
- C. (2), (3), dan (4)
- D. (1) dan (3) saja
- E. (2) dan (4) saja

55. Stimulus:

Dalam proses penyusunan Undang-Undang tentang Kesehatan, terdapat penolakan dari berbagai organisasi profesi tenaga kesehatan yang merasa aspirasinya tidak diakomodasi secara optimal. Di sisi lain, pembentuk undang-undang menyatakan telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pihak. Muncul perdebatan mengenai kriteria partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation).

Pertanyaan:

Ditinjau dari asas Demokrasi Pancasila (Sila Keempat), keberadaan meaningful participation dalam pembentukan undang-undang bertujuan untuk ...

- A. Sekadar memenuhi formalitas prosedur administratif agar perundang-undangan tidak diuji di Mahkamah Konstitusi.
- B. Memastikan bahwa proses musyawarah dilakukan secara substantif dengan mendengarkan, mempertimbangkan, dan memberikan penjelasan atas aspirasi rakyat.
- C. Meminta persetujuan mutlak dari seluruh elemen masyarakat sebelum undang-undang disahkan oleh DPR dan Presiden.

- D. Menyerahkan sepenuhnya pembentukan hukum kepada kelompok kepentingan yang memiliki pengaruh politik terbesar.
- E. Menggantikan peran lembaga perwakilan rakyat dengan mekanisme pemungutan suara langsung (referendum) pada setiap RUU.

56. Stimulus:

Sebuah daerah kaya akan sumber daya minyak dan gas bumi menuntut pembagian hasil pengelolaan yang jauh lebih besar dari ketentuan nasional. Pemerintah daerah mengancam akan membatasi pasokan energi ke daerah tetangga jika tuntutannya tidak dipenuhi. Pemerintah pusat berargumen bahwa sumber daya alam adalah kekayaan nasional yang harus didistribusikan secara adil untuk pembangunan seluruh wilayah Indonesia.

Pertanyaan:

Bagaimanakah penyelesaian kasus tersebut berdasarkan pilar Pancasila sebagai dasar negara?

- A. Memenuhi seluruh tuntutan daerah tersebut demi mencegah ancaman disintegrasi bangsa, meskipun merugikan daerah lain.
- B. Menerapkan pendekatan militer dan hukum secara represif untuk menundukkan pemerintah daerah tanpa ruang negosiasi.
- C. Melakukan musyawarah nasional (Sila IV) untuk merumuskan dana bagi hasil yang adil (Sila V) tanpa mengorbankan ikatan persatuan nasional (Sila III).
- D. Menyerahkan pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya kepada pihak swasta agar pemerintah tidak perlu membagi hasil.
- E. Membiarkan konflik berlarut-larut sampai kedua pihak menemukan titik temu secara spontan di pasar bebas.

57. Stimulus:

Pemerintah meluncurkan program pembangunan infrastruktur strategis nasional yang melintasi wilayah adat sebuah suku lokal. Pembangunan tersebut berpotensi menggeser pemukiman tradisional dan mengganggu mata pencaharian warga adat. Sebagian masyarakat mendukung karena proyek ini dianggap memajukan konektivitas ekonomi nasional, namun sebagian lain menolak karena merasa hak atas tanah leluhurnya diabaikan.

Pertanyaan:

Prinsip Pancasila manakah yang harus dijadikan dasar resolusi konflik agar pembangunan nasional tidak melanggar hak asasi manusia?

- (1) Sila Kedua: Menghormati martabat dan hak atas tanah ulayat masyarakat adat melalui proses ganti rugi yang adil dan dialog tanpa pemaksaan.
- (2) Sila Ketiga: Mengorbankan kepentingan kelompok lokal secara mutlak demi kepentingan persatuan dan pembangunan nasional.
- (3) Sila Keempat: Melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait tata ruang wilayah mereka.
- (4) Sila Kelima: Memastikan pembangunan infrastruktur membawa pemerataan kesejahteraan yang juga dirasakan oleh masyarakat adat setempat.

Pernyataan yang tepat adalah ...

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1), (3), dan (4)
- C. (2) dan (4) saja
- D. (1) dan (3) saja
- E. Semua benar

58. Stimulus:

Fenomena maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan penegak hukum memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Beberapa pengamat menyatakan bahwa tindakan korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum tindak pidana khusus, tetapi merupakan pengkhianatan mendasar terhadap keberadaan Pancasila sebagai dasar negara.

Pertanyaan:

Mengapa korupsi dikategorikan sebagai ancaman langsung terhadap kedudukan Pancasila sebagai dasar negara?

- A. Korupsi merusak fondasi keadilan sosial (Sila V), meruntuhkan kepercayaan publik pada perwakilan rakyat (Sila IV), dan mencederai nilai kemanusiaan (Sila II).
- B. Korupsi hanya merugikan keuangan negara secara finansial tanpa mempengaruhi ideologi atau pandangan hidup bangsa.
- C. Korupsi merupakan tindak pidana biasa yang cukup diselesaikan melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- D. Korupsi terjadi semata-mata karena rendahnya gaji pejabat, bukan karena kerapuhan penghayatan nilai dasar negara.
- E. Korupsi memicu kebangkitan ideologi asing yang secara otomatis menggantikan struktur hukum Pancasila.

59. Stimulus:

Dalam era globalisasi, timbul arus budaya luar yang membawa nilai-nilai individualisme ekstrim dan hiper-konsumerisme di kalangan remaja. Di sisi lain, terdapat pula ancaman pemikiran radikalisme transnasional yang menolak konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ingin mengganti sistem ketatanegaraan dengan sistem lain.

Pertanyaan:

Sebagai dasar negara dan ideologi terbuka, bagaimana Pancasila harus diposisikan oleh negara dan warga negara dalam menghadapi tantangan tersebut?

- A. Menutup diri sepenuhnya dari interaksi internasional dan melarang masuknya segala bentuk teknologi serta budaya asing.
- B. Mengadopsi seluruh nilai asing agar bangsa Indonesia dipandang modern dan sejajar dengan negara-negara maju.
- C. Menjadikan Pancasila sebagai filter kritis yang menyaring budaya asing positif (inovasi/ilmu pengetahuan) dan menolak paham yang bertentangan dengan kebhinekaan serta kemanusiaan.
- D. Mengganti Pancasila dengan ideologi yang lebih fleksibel agar mampu mengikuti tren ekonomi global.
- E. Membiarkan ideologi radikal berkembang sebagai wujud kebebasan berpendapat yang tanpa batas dalam demokrasi.

60. Stimulus:

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terkait syarat usia calon pejabat negara. Putusan tersebut menuai polemik tajam di masyarakat karena dianggap menguntungkan figur politik tertentu dan dinilai cacat etika ketatanegaraan oleh Dewan Kehormatan Hakim. Masyarakat khawatir prinsip rule of law tergeser oleh rule of power.

Pertanyaan:

Berdasarkan pilar ketatanegaraan Indonesia, bagaimanakah seharusnya Pancasila dijadikan rujukan etik dan moral dalam menjaga integritas lembaga peradilan?

- (1) Hakim konstitusi wajib menjadikan Sila Ketiga sebagai landasan untuk menjaga persatuan nasional di atas kepentingan politik praktis.

- (2) Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan menuntut para hakim bekerja dengan kejujuran nurani dan menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat.
- (3) Putusan lembaga peradilan harus selalu memprioritaskan kepentingan penguasa demi menjaga stabilitas pemerintahan.
- (4) Penegakan etika ketatanegaraan adalah syarat mutlak agar produk hukum memiliki legitimasi moral sesuai dasar negara.

Pernyataan yang mendukung analisis tersebut adalah ...

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1), (2), dan (4)
- C. (2) dan (4) saja
- D. (1) dan (3) saja
- E. (3) dan (4) saja

Soal 11

Stimulus:

Pada masa pandemi atau krisis nasional, pemerintah menetapkan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Alokasi Anggaran Darurat yang mengalihkan sebagian dana pembangunan daerah untuk penanganan kesehatan dan bantuan sosial. Kebijakan ini membatasi sebagian hak sipil warga negara (seperti kebebasan berkumpul dan berusaha) demi keselamatan jiwa masyarakat.

Pertanyaan:

Analisislah legitimasi tindakan ketatanegaraan pemerintah tersebut berdasarkan Sila Kedua dan Sila Ketiga Pancasila!

- A. Tindakan pemerintah tidak sah karena hak asasi manusia bersifat mutlak dan tidak boleh dibatasi dalam situasi apa pun.
- B. Kebijakan tersebut sah dan berlandaskan filosofi *salus populi suprema lex esto* (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi), yang selaras dengan kewajiban negara melindungi segenap bangsa Indonesia.
- C. Pembatasan kegiatan masyarakat merupakan bentuk pelanggaran hukum berat yang sengaja dirancang untuk mematikan ekonomi rakyat.
- D. Pemerintah seharusnya membiarkan krisis berjalan secara alami sesuai dengan mekanisme penyesuaian masyarakat (*social darwinism*).
- E. Pengalihan anggaran darurat bertentangan dengan Sila Keempat karena tidak diawali dengan pemungutan suara seluruh rakyat.

Soal 12

Stimulus:

Pasca-reformasi, terjadi perubahan besar dalam tata negara Indonesia melalui amandemen UUD 1945, seperti pembentukan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, serta penerapan pemilihan presiden secara langsung. Namun demikian, Pembukaan UUD 1945 yang memuat lima sila Pancasila sepakat untuk tidak diubah sedikit pun oleh MPR.

Pertanyaan:

Mengapa Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila tidak boleh diubah, meskipun pasal-pasal batang tubuh UUD 1945 dapat diamandemen?

- A. Pembukaan UUD 1945 memuat *staatsfundamentalnorm* (norma dasar negara) dan cita-cita berdirinya NKRI; mengubahnya sama artinya dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- B. Anggota MPR tidak memiliki hak hukum untuk mengubah teks tertulis yang dibuat oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*).

- C. Tata cara perubahan Pembukaan UUD 1945 terlalu rumit sehingga tidak pernah berhasil dilaksanakan dalam sidang MPR.
- D. Pembukaan UUD 1945 bersifat dogmatis dan hanya berisikan teks sejarah tanpa implikasi hukum pada tata negara saat ini.
- E. Dunia internasional melarang Indonesia mengubah Pembukaan UUD 1945 sebagai syarat pengakuan kedaulatan.

Soal 13

Stimulus:

Sejumlah warga di kawasan pesisir menghadapi ancaman pengusuranserta kehilangan mata pencaharian akibat proyek reklamasi pantai oleh korporasi swasta yang telah mengantongi izin dari pemerintah setempat. Warga melakukan upaya hukum dan audiens ke DPRD untuk menuntut hak atas lingkungan hidup yang sehat dan pemukiman yang layak.

Pertanyaan:

Berdasarkan tuntutan warga pesisir tersebut, manakah substansi Sila Kelima Pancasila yang wajib diwujudkan oleh negara dalam keputusan hukum ketatanegaraan?

- (1) Negara wajib menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi kapitalistik tidak mengorbankan kesejahteraan dan hak dasar rakyat kecil.
- (2) Distribusi akses terhadap sumber daya alam harus berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan.
- (3) Pemerintah daerah berhak mengabaikan nasib warga pesisir demi mempercepat penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).
- (4) Penegakan hukum wajib memberikan kepastian perlindungan ruang hidup yang layak bagi seluruh warga negara secara adil.

Pernyataan yang tepat adalah ...

- A. (1), (2), dan (3)
- B. (1), (2), dan (4)
- C. (2) dan (3) saja
- D. (1) dan (4) saja
- E. Semua benar

Soal 14

Stimulus:

Dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), kerap dijumpai kampanye hitam (black campaign) yang menghembuskan narasi kebencian suku, agama, dan ras untuk menjatuhkan lawan politik. Strategi ini terbukti mampu membelah dukungan warga dan memicu gesekan fisik di lapangan.

Pertanyaan:

Analisislah dampak tindakan politik identitas destruktif tersebut terhadap kedudukan Pancasila sebagai identitas dan dasar negara!

- A. Meningkatkan partisipasi politik warga karena membakar semangat emosional pendukung kandidat.
- B. Meruntuhkan nilai Persatuan Indonesia (Sila III) dan mencederai rasionalitas musyawarah demokrasi (Sila IV) demi kepentingan kekuasaan pragmatis.
- C. Merupakan dinamika wajar dalam sistem demokrasi liberal sehingga tidak memerlukan intervensi hukum.
- D. Memperkuat kebhinekaan karena memperjelas batas-batas identitas antar kelompok masyarakat.

E. Membuktikan bahwa Pancasila tidak lagi relevan sebagai pemersatu bangsa dalam era kompetisi terbuka.

Soal 15

Stimulus:

Pemerintah menyusun Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi dengan fokus pada digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, kendala utama yang dihadapi adalah belum meratanya infrastruktur internet dan listrik di daerah pedalaman Papua dan NTT, sehingga pelaku UMKM di wilayah tersebut tertinggal jauh dibanding di Pulau Jawa.

Pertanyaan:

Langkah pemerintah yang paling mencerminkan pengamalan Pancasila sebagai dasar kebijakan ketatanegaraan dalam mengatasi ketimpangan digital tersebut adalah ...

- A. Menghentikan program digitalisasi di seluruh Indonesia sampai daerah pedalaman siap secara alami.
- B. Memfokuskan seluruh anggaran pembangunan digital hanya di kota-kota besar agar efisien dan menghasilkan keuntungan cepat.
- C. Melakukan afirmatif pembangunan infrastruktur teknologi (Sila V) di wilayah terluar untuk menjamin kesetaraan kesempatan ekonomi (Sila II & V).
- D. Menyerahkan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil sepenuhnya kepada inisiatif swasta tanpa subsidi negara.
- E. Mewajibkan warga pedalaman berpindah ke Pulau Jawa jika ingin menikmati fasilitas digital nasional.

Soal 16

Stimulus:

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden menyetujui pembentukan sebuah daerah otonom baru (pemekaran wilayah). Kebijakan ini diambil setelah melalui proses kajian mendalam yang menunjukkan bahwa luas wilayah yang ekstrem dan rentang kendali pemerintahan selama ini menghambat pelayanan publik dasar dan pemerataan ekonomi bagi warga setempat.

Pertanyaan:

Manakah analisis yang paling tepat terkait hubungan antara pemekaran daerah tersebut dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pancasila?

- A. Pemekaran daerah bertujuan membagi-bagi kekuasaan politik di antara elite daerah tanpa memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
- B. Pemekaran daerah merupakan instrumen ketatanegaraan untuk mendekatkan pelayanan negara kepada rakyat demi mewujudkan keadilan sosial (Sila V) dan menjaga persatuan nasional (Sila III).
- C. Kebijakan pemekaran daerah selalu bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia karena memperlemah pemerintah pusat.
- D. Pemekaran daerah hanya boleh dilakukan jika daerah tersebut menyumbangkan pendapatan besar bagi kas negara pusat.
- E. Proses pembentukan daerah baru merupakan agenda politik spontan tanpa perlu berlandaskan pertimbangan filosofis dasar negara.

Soal 17

Stimulus:

Seorang warga negara mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi terkait aturan pasal dalam UU Pemilu yang menetapkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Pemohon menilai syarat tersebut membatasi hak warga negara untuk memilih pilihan calon pemimpin yang beragam dan berpotensi melahirkan oligarki politik.

Pertanyaan:

Dalam menimbang permohonan tersebut, pandangan hukum ketatanegaraan yang berbasis pada Sila Keempat Pancasila adalah ...

- (1) Menjamin bahwa sistem pemilu memberikan ruang kedaulatan rakyat yang substantif, bukan sekadar saluran formal bagi kekuatan modal.
- (2) Memastikan sistem perwakilan mendorong kedaulatan rakyat melalui pilihan-pilihan kepemimpinan yang inklusif dan berkualitas.
- (3) Mengunci sistem pencalonan agar hanya partai-partai besar yang berhak menentukan arah masa depan bangsa.
- (4) Menyeimbangkan antara kepastian stabilitas pemerintahan parlementer/presidensial dengan keterbukaan hak konstitusional warga negara.

Pernyataan yang tepat dalam merefleksikan nilai Sila Keempat adalah ...

- A. (1), (2), dan (4)
- B. (1), (2), dan (3)
- C. (3) dan (4) saja
- D. (1) dan (3) saja
- E. Semua benar

Soal 18

Stimulus:

Konflik lahan terjadi antara masyarakat adat yang mempertahankan hutan lindung sebagai area sakral dan sumber kehidupan dengan perusahaan tambang yang telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari kementerian terkait. Pemerintah pusat berupaya memediasi konflik tersebut dengan meninjau ulang izin tambang dan menetapkan kawasan hutan adat.

Pertanyaan:

Tindakan pemerintah meninjau ulang izin tambang dan menetapkan hutan adat mencerminkan keberhasilan Pancasila sebagai dasar negara dalam hal ...

- A. Mengutamakan keuntungan finansial jangka pendek korporasi di atas kelestarian lingkungan hidup.
- B. Memadukan nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila II) serta Keadilan Sosial (Sila V) dalam perlindungan ekologis dan hak masyarakat adat.
- C. Menunjukkan kelemahan pemerintah dalam mempertahankan regulasi investasi yang telah diterbitkan.
- D. Mengabaikan kepastian hukum investasi demi menuruti seluruh tekanan demonstrasi massa.
- E. Mengarahkan negara ke sistem ekonomi komunal radikal yang melarang keberadaan investasi swasta.

Soal 19

Stimulus:

Di era keterbukaan informasi, lembaga penegak hukum sering mendapat sorotan publik terkait dugaan penanganan kasus kriminal yang "tajam ke bawah, tumpul ke atas". Kasus pencurian kecil oleh warga miskin diproses cepat hingga hukuman penjara, sementara kasus korupsi kelas berat sering mendapat tuntutan ringan atau kebebasan bersyarat.

Pertanyaan:

Ditinjau dari kedudukan Pancasila sebagai dasar hukum dan cita keadilan bangsa, fenomena penegakan hukum yang diskriminatif tersebut merupakan bentuk ...

- A. Penerapan asas kepastian hukum yang sangat baik dan patut dipertahankan dalam sistem pidana Indonesia.

- B. Kegagalan aktualisasi Sila Second (Kemanusiaan) dan Sila Fifth (Keadilan Sosial), di mana persamaan di hadapan hukum (equality before the law) terabaikan.
- C. Bukti bahwa Pancasila hanya relevan dalam ranah teori politik dan tidak dapat diterapkan dalam dunia hukum praktis.
- D. Keniscayaan struktur hukum di negara berkembang yang tidak perlu diperbaiki.
- E. Sikap profesional aparaturnya penegak hukum dalam menghormati status sosial para pelaku kejahatan.

Soal 20

Stimulus:

Dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia menghadapi dinamika konflik geopolitik dunia (seperti perang antarnegara dan rivalitas kekuatan besar), Indonesia konsisten memilih posisi Bebas dan Aktif, serta tidak menjadi anggota pakta militer mana pun. Indonesia aktif mengusulkan diplomasi perdamaian dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik internasional.

Pertanyaan:

Analisislah relevansi sikap politik luar negeri Indonesia tersebut dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara!

- A. Sikap tersebut berlandaskan Sila Second (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) serta Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.
- B. Indonesia bersikap netral semata-mata karena tidak memiliki kekuatan militer yang cukup untuk berpartisipasi dalam perang.
- C. Kebijakan tersebut merugikan Indonesia karena kehilangan kesempatan memperoleh bantuan persenjataan dari blok negara pemenang.
- D. Politik bebas aktif bertentangan dengan Sila Ketiga karena mengabaikan pertahanan nasional dari ancaman luar.
- E. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Indonesia terisolasi dari pergaulan diplomasi global modern.

KUNCI JAWABAN

1. A,B,D	
2. A,B,C	
3. A,B,C	
4. A,B,C	
5. A,B	

6. A,B,C	
7. A,B,D	
8. A,B,C	
9. A,B,C	
10. A,B,C	
11. C	
12. A	
13. B	
14. C	
15. B	
16. A	
17. B	
18. A	
19. B	
20. B	
21. C	
22. B	
23. B	
24. B	
25. B	
26. A	
27. B	
28. C	
29. B	
30. C	
31. B	
32. C	
33. C	
34. B	
35. B	
36. B	
37. C	
38. C	
39. C	
40. C	
41. B	
42. B	
43. B	
44. B	

45. B	
46. C	
47. B	
48. C	
49. C	
50. B	